

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Anggota DPRD Usul Penjabat Gubernur Jakarta Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta diperpanjang untuk membuat kinerja pemerintahan daerah lebih efisien. Alasannya, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2024 tidak lebih dari enam bulan. Di sisi lain, Heru dinilai menjadi sosok yang tepat untuk memastikan semua program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan lancar.

Masa jabatan Heru Budi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir 17 Oktober. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, masa jabatan Pj setahun dan dapat diperpanjang setahun lagi. Adapun Heru menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara dari Fraksi PDI Perjuangan Johnny Simanjuntak berharap Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan Heru Budi. Menurut Johnny, banyak hal bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang masa jabatan Heru Budi.

Pertama, terkait Pilkada Jakarta 2024, Johnny mengatakan, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jakarta hasil pilkada tidak lebih dari enam bulan. Pemungutan suara dilakukan 27 November 2024, sedangkan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif Januari 2025.

"Jabatan Pak Heru ini, kan, tinggal tiga atau empat bulan lagi. Saya pikir beliau saja yang melanjutkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta," kata Johnny, Minggu (8/9/2024).

Kedua, jika Pj Gubernur DKI Jakarta dipilih yang baru, diperlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan barunya. Padahal, masa jabatannya terbilang singkat.

Di sisi lain, Heru sudah berpengalaman sehingga ia tinggal mengeksekusi atau menyiapkan program strategis lainnya untuk DKI. "Kalau ganti penjabat gubernur lagi, nanti posisinya agak *nanggung* karena hanya tiga bulan. Kalau datang penjabat baru, nanti dia harus belajar dulu," ujarnya.

Harapan ini disampaikan Johnny dengan mempertimbangkan kelancaran roda organisasi perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta. "Oke, jabatan Heru berakhir dua tahun, tetapi, kan, tidak dikhususkan harus dua tahun selesai karena masih bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," ujarnya.

Pembahasan

Meski demikian, aspirasi ini tidak bisa dilakukan sepihak sehingga diperlukan rapat pembahasan. DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pembahasan dan penetapan usulan nama calon Pj gubernur pada Rabu (11/9). Dari 11 parpol di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, setiap fraksi mengusulkan tiga nama kandidat Pj gubernur.

Selanjutnya, nama-nama yang terkumpul dari hasil aspirasi legislatif bakal diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak atas penetapan Pj gubernur.

"Tetapi, kalau nanti kami hanya sepakat satu orang, ya, tidak ada masalah. Nanti hasil rapat ini akan dikirim ke Kemendagri," kata Johnny.

Senada dengan Johnny, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina, juga setuju perpanjangan masa jabatan Heru. Elva mengatakan, Heru telah menunjukkan kemampuannya menjaga stabilitas pemerintahan dan memainkan peranan penting dalam masa transisi ini.

Heru juga mampu merampungkan berbagai program yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Contohnya, penyelesaian proyek sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Timur untuk mengatasi persoalan banjir. Bahkan, Heru juga baru mulai melakukan uji coba makan bergizi gratis yang menjadi program utama dari pemerintahan selanjutnya (Prabowo-Gibran) di sejumlah sekolah.

"Dengan pengalamannya, Pak Heru merupakan sosok yang tepat untuk memastikan semua program berjalan lancar dan efektif," ujar Elva.

Sementara itu, Heru Budi berkomitmen mengikuti peraturan yang ada soal pergantian Pj gubernur. Heru menyebut hanya menjalankan tugas yang diberikan kepadanya oleh Kemendagri.

"Diganti atau tidak, terserah Mendagri. Saya hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diserahkan kepada saya. Tepat 17 Oktober 2024 merupakan dua tahun saya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta," ujar Heru.

Adapun jika tidak kembali menjabat, Heru berpesan kepada Pj selanjutnya agar dapat melanjutkan dan mengembangkan program yang sudah dirintis. Hal itu guna membangun Jakarta menjadi semakin baik di masa depan.

"Kalimat kata kunci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah maju dan berkelanjutan. Pemerintah pusat memerintahkan kepada semua kepala daerah untuk maju dan berkelanjutan. Apa yang sudah ditanamkan hari ini harus berkelanjutan," kata Heru. (TIK)